



Bulletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



Bappebti & SRO Optimis Kelola Tax Amnesty

**PEKI Sarana Pemasaran
Kopi Nasional**

**Jamkrindo Lindungi
Pelaku SRG 100%**



4-7

Berita Utama

- Bappebti & SRO Optimis Kelola Tax Amnesty
- Tax Amnesty Stimulus Bursa Berjangka

8-11

Pasar Fisik

- Pasar Fisik Timah Sarana Strategis Tingkatkan Pendapatan Negara
- PEKI Sarana Pemasaran Kopi Nasional

12-13

Resi Gudang

- Jamkrindo Lindungi Pelaku SRG 100 %

14-15 Agenda Foto

16-17 Aktualita

- Mendag Enggar Kunjungi 'Markas' Bappebti
- Bappebti Optimis Transaksi Multilateral 2016 Naik 16 %
- JFX Melaju Dalam Era Digital Marketing
- GKIB Siap Berkompetisi Dongkrak Kontrak Berjangka

18 Analisa

19 Breaking News

20 Info

21 Info SRG

22-24 KomiKita

SRG dan Pasar Lelang Komoditi Part III



24-25 Kolom

Efektifkah 7 Institusi Keroyok Investasi Bodong?



26-27 Kiprah

SRG Losarang Indramayu Ancang-Ancang Ekspor Beras



Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab

Bachrul Chairi

Redaktur

Didi Sumedi

Penyunting/ Editor

Taufik KS
Annisa F Wulandari
Aryo Guritno

Fotografer

Apriliyanto
Poppy Juliyanti
Gita Regina

Sekretaris

Katimin

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:

humas.bappebti@kemendag.go.id



Foto : Mendag, Enggartiasto Lukita didampingi Kepala Bappebti Bachrul Chairi, mendapat penjelasan sistem pengawasan PBK dari Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu.

Industri perdagangan berjangka komoditi resmi sebagai sarana pengelolaan dana repatriasi dari pengampunan pajak- tax amnesty. Ketetapan itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.08/2016, tentang tata cara pengalihan harta wajib lapor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrument investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

PMK No. 123/PMK.08/2016, yang terbit pada 08 Agustus 2016, di Pasal 6 Ayat 2 huruf J, menjelaskan; "Investasi atas dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia."

Menyikapi terbitnya PMK No. 123/PMK.08/2016, itu, Bappebti bersama SRG- self regulatory organization telah membentuk tim yang bertugas menginventarisir permasalahan dan menyusun kebijakan sebagai payung hukum pengelolaan dana repatriasi di industri perdagangan berjangka komoditi. Tim tersebut akan bekerja dalam rentang waktu tiga bulan, yang artinya industri perdagangan berjangka komoditi akan siap mengelola dana repatriasi di awal bulan November 2016.

Dirut Jakarta Futures Exchange- JFX, Stephanus Paulus Lumintang, menyambut positif kebijakan pemerintah yang melibatkan bursa berjangka sebagai sarana pengelolaan dana repatriasi dari pengampunan pajak- tax amnesty. "Tapi yang jelas, tax amnesty ini menjadi tantangan tersendiri bagi bursa berjangka. Sebab itu SRO dan tentunya dengan Bappebti, harus benar-benar memikirkan tata cara masuknya tax amnesty di bursa berjangka agar produktif. Sehingga program pemerintah beriring sejalan dengan pemilik dana," katanya.

Senada dengan itu di tempat yang sama Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto, mengatakan, kebijakan pemerintah itu akan mendorong pelaku industri untuk inovatif menciptakan kontrak berjangka yang sesuai dengan selera pasar tetapi tidak keluar dari koridor tujuan perdagangan berjangka yang diatur oleh undang-undang.

"Kalau kita lihat dari karakteristik dana tax amnesty itu, industri ini seharusnya menjadi pilihan tepat. Karena pemerintah membatasi minimal tiga tahun kemudian dana itu baru bisa ditarik kembali. Itu artinya, para pemilik dana akan menginvestasikan dananya di instrument yang aman, fair, transparan tetapi tetap menguntungkan," kata Tris Sudarto.

Lebih gamblang pembahasan tentang PMK No. 123/PMK.08/2016, itu, dapat diikuti lebih lanjut pada laporan Redaksi di rubrik Berita Utama.

Di samping laporan tersebut, seperti biasa Redaksi juga menyampaikan laporan yang tak kalah menarik. Seperti, rencana Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI yang akan menggelar *Indonesia Tin Conference and Exhibition- ITCE*, pada 18-20 September 2016, di Bali.

Di sisi lain, Redaksi juga melaporkan gagasan Bappebti membentuk Portal Ekspor Kopi Indonesia- PEKI. Sarana ini merupakan terobosan dan sekaligus solusi penataan perdagangan komoditi di dalam negeri. Konsepnya, PEKI sebagai pendaftaran kontrak kopi- *trade registration* untuk tujuan ekspor, dan pembentukan harga- price discovery di bursa berjangka.

Salam!



Repatriasi dana melalui pengampunan pajak- tax amnesty menjadi ladang baru bagi industri perdagangan berjangka Indonesia. Diyakini likuiditas dan sekap terjang bursa berjangka semakin membubung.

Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.08/2016, tentang tata cara pengalihan harta wajib lapor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrument investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak, agaknya menjadi kado terindah bagi industri perdagangan berjangka komoditi dalam menyambut HUT RI ke 71 tahun.

Seperti ditegaskan pada Pasal 6 Ayat 2 huruf J, yang berbunyi; "Investasi atas dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dalam bentuk kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia."

Atas dasar keluarnya PMK No. 123/PMK.08/2016, itu, otoritas perdagangan berjangka- Bappebti langsung merespon dan merapatkan barisan bersama *self regulatory organization- SRO*. "Dalam waktu dekat ini kami akan menyiapkan aturan untuk menampung dana repatriasi



dari program pengampunan pajak atau *tax amnesty*," ujar Kepala Bappebti, Bachrul Chairi optimis kepada media di sela-sela pelatihan wartawan mengenai di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang bertajuk "Memahami Margin, Hedging, dan *Capital (Risk) Management*" di Yogyakarta, 12-14 Agustus 2016, lalu.

Lebih jauh ditegaskan Bachrul, menindaklanjuti keluarnya kebijakan Kementerian Keuangan, itu, Bappebti

diberi rentang waktu sekitar tiga bulan untuk merampungkan ketentuan teknis penampungan dana repatriasi di bursa berjangka komoditi. "Karena itu dalam waktu dekat kami akan membentuk tim. Sehingga diperkirakan awal bulan November semua sudah siap dan pialang berjangka sudah bisa mengelola dana repatriasi atau dana *tax amnesty*," katanya.

Dari 'kacamata' Bachrul Chairi,

kontrak berjangka yang dapat diinvestasikan yang berasal dari dana *tax amnesty* adalah kontrak berjangka yang terdaftar bursa berjangka. "PMK No. 123 sudah tegas mengatakan, yakni kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia," jelasnya.

Sebagai gambaran, dua bursa berjangka yang saat ini ada di Indonesia (Bursa Berjangka Jakarta-BBJ, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI) tercatat memperdagangkan kontrak berjangka komoditi *crude palm oil- CPO*, minyak goreng- *Olein*, kopi (arabika/robusta), kakao dan emas. Selain itu, kontrak fisik yang diperdagangkan di bursa berjangka yakni komoditi timah, batubara dan karet.

"Dengan adanya dana repatriasi yang berpotensi masuk ke bursa berjangka, tentunya kami akan mendorong bursa berjangka mendisain kontrak berjangka baru. Misalnya, kontrak berjangka komoditi mineral, energi dan bahkan kontrak berjangka syariah. Itu penting untuk memperbesar pasar berjangka," tambah Bachrul Chairi.

Lebih jauh diutarakan Bachrul, kontrak berjangka syariah adalah kontrak yang potensial dikembangkan di bursa berjangka. "Dari informasi yang kami terima, diketahui perbankan syariah kelebihan likuiditas. Sehingga mereka memerlukan sebuah instrumen yang mampu menampung kelebihan likuiditas itu di bursa berjangka. Beberapa waktu lalu sudah ada MoU bursa berjangka dengan sejumlah perbankan syariah, namun MoU itu belum bisa direalisasikan karena menunggu peraturan teknis dari bank sentral syariah," katanya.

"Karena itu kami sangat berharap diakhir tahun ini atau selambatnya diawal tahun depan bursa berjangka sudah memperdagangkan kontrak berjangka syariah sebagai upaya memperbesar pasar perdagangan berjangka," imbuh Bachrul.

Insentif

Selain upaya memperbesar pasar berjangka dengan menampung dana repatriasi di bursa berjangka, Bappebti juga akan mempersiapkan sejumlah peraturan yang meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon investor. Di samping itu, memberi insentif bagi pelaku pasar yang aktif dalam perdagangan kontrak berjangka komoditi.

"Kita tentunya ingin menciptakan iklim kondusif bagi calon investor yang berasal dari dana repatriasi, agar mereka tidak komplain dan keluar dari industri ini," tegas Bachrul.

Untuk itu, tambahnya, akan ada pengetatan peraturan dan sejumlah persyaratan khusus bagi perusahaan pialang berjangka yang mengelola dana repatriasi.

"Jika industri ini berjalan optimal mengelola dana repatriasi, kami pun akan menginisiasi pemberian insentif berupa keringanan pajak final dengan usulan 1 % dari nilai margin. Karena itu pun sudah meminta penyesuaian dengan PMK baru agar setara antara bursa berjangka komoditas dengan pasar modal di Indonesia," pungkas Bachrul Chairi.

Syarat Pialang Berjangka Pengelola Dana Repatriasi

Kepala Biro Peraturan, Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Haryati, kepada **Buletin Bappebti**, mengungkapkan, perusahaan pialang berjangka yang akan mengelola dana repatriasi di bursa berjangka harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan. Dan persyaratan itu nantinya akan tertuang di peraturan Kepala Bappebti.

"Untuk menetapkan persyaratan itu, saat ini tim yang dibentuk Kepala Bappebti masih bekerja dan menginventarisir masalah. Sesuai dengan PMK No. 123, tim itu akan bekerja selama tiga bulan dan diharapkan akhir Oktober nanti sudah ada peraturan Kepala Bappebti dalam rangka pengelolaan dana repatriasi di bursa berjangka," katanya.

Anggota tim itu terdiri dari Bappebti, SRO, Aspebtindo dan bank penyimpan margin yang menjadi *gate way* dana repatriasi sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

Lebih jauh diutarakan Sri Haryati, sebagai gambaran perusahaan pialang berjangka yang bisa mengelola dana repatriasi antara lain aktif dalam transaksi multilateral, tertib menyampaikan laporan keuangan harian/bulanan/tahunan, tidak dalam status dibekukan, modal bersih disesuaikan- MBD yang cukup sesuai ketentuan dan memiliki *desk commodity*.

"Kami juga nantinya akan mengusulkan syarat lain yakni perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dalam sistem informasi transaksi nasabah- SITNA yang disediakan lembaga kliring," jelasnya.

Dengan memenuhi berbagai persyaratan itu, nantinya perusahaan pialang berjangka akan memperoleh izin dari Bappebti. Demikian juga halnya jika perusahaan pialang berjangka bertindak sebagai *market maker* terhadap kontrak berjangka.

Sedangkan dari sisi calon investor, dipersyaratkan menunjukan dana yang ditransaksikan sudah melalui proses *tax amnesty*. "Nantinya dana itu pun akan ditempatkan direkening terpisah yang khusus di perusahaan pialang, sehingga pergerakannya dapat dipantau setiap saat," imbuh Sri Haryati.

Implikasi terbitnya peraturan Kepala Bappebti terkait pengelolaan dana repatriasi di bursa berjangka, maka bursa berjangka dan lembaga kliring harus memperbaharui peraturan tata tertib- PTT. Sedangkan di sisi perusahaan pialang berjangka akan terjadi perubahan nota perjanjian nasabah. Hal itu dikarenakan adanya kewajiban pelaporan dana nasabah secara periodik.



Repatriasi dana warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri melalui program pengampunan pajak- *tax amnesty* menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk menggerakkan dan membangun sektor perekonomian. Terkait itu, pemerintah pun menyediakan sejumlah instrument investasi yang dapat mengelola dana repatriasi di dalam negeri. Diantaranya industri perdagangan berjangka komoditi seperti tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.08/2016, tentang tata cara pengalihan harta wajib lapor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penempatan pada instrument investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak.

Menyikapi keluarnya PMK No. 123/PMK.08/2016, tertanggal 08 Agustus 2016, itu, Dirut Jakarta Futures Exchange-JFX, Stephanus Paulus Lumintang, disela-sela pelatihan jurnalis di bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi dengan tema "Memahami Margin, *Hedging*, dan *Capital (Risk) Management*" di Yogyakarta, 12-14 Agustus 2016, lalu, mengatakan, masuknya dana *tax amnesty* ke industri perdagangan berjangka komoditi akan menambah portofolio dan stimulus bagi bursa berjangka.

"Tapi yang jelas, *tax amnesty* ini menjadi tantangan tersendiri bagi bursa berjangka. Sebab itu SRO- *self regulatory organization* dan tentunya dengan Bappebti, harus benar-benar memikirkan tata cara masuknya *tax amnesty* di bursa berjangka agar produktif. Sehingga program pemerintah beriring sejalan dengan pemilik dana," jelas Paulus.

Senada dengan itu di tempat yang sama Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto, mengatakan, dipilihnya industri perdagangan berjangka komoditi sebagai salah satu alternatif penampungan dana *tax amnesty*, akan mendorong pelaku industri untuk inovatif

menciptakan kontrak berjangka yang sesuai dengan selera pasar tetapi tidak keluar dari koridor tujuan perdagangan berjangka yang diatur oleh undang-undang.

Lebih jauh dijelaskan Tris Sudarto, kalau kita lihat dari karakteristik dana *tax amnesty* itu, industri ini seharusnya menjadi pilihan tepat. Karena pemerintah membatasi minimal tiga tahun kemudian dana itu baru bisa ditarik kembali. "Itu artinya, para pemilik dana akan menginvestasikan dananya di instrument yang aman, fair, transparan tetapi tetap menguntungkan," katanya.

"Misalnya *hedging*- lindung nilai kontrak berjangka emas, dibelahan dunia mana pun instrument ini selalu menjadi pilihan utama para investor. Sebab, meski harga kontrak berjangka emas fluktuatif di pasar, tetapi nilainya tetap sama," jelas Tris Sudarto.

'Nah, harapannya ketika pemilik dana *tax amnesty* itu nyaman berada



Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, memimpin pertemuan dengan SRO dan membentuk tim pembahas aturan turunan dan implementasi dari PMK Nomor 123/PMK.08/2016

di industri perdagangan berjangka komoditi, tambah Tris Sudarto, baru-lah ditawarkan kontrak berjangka lainnya.

Trust

Kunci sukses industri perdagangan berjangka komoditi menjadi pilihan pengelolaan dana *tax amnesty* diantaranya menciptakan rasa aman dan nyaman. Sebab itu, kepercayaan- *trust* investor terhadap industri perdagangan berjangka komoditi harus dibangun dan dikembangkan.

"Selama ini kita sudah berupaya keras menggiring para pelaku usaha untuk melakukan *hedging* di bursa berjangka dalam negeri. Tetapi realitanya mereka tetap melakukan *hedging* atau spekulasi di luar negeri. Itu disebabkan belum adanya *trust* dan kurang likuidnya pasar," ujar Paulus.

Karena itu, tambah Paulus, pihaknya akan terus berupaya keras melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi.

"Mungkin strategi ini agak lambat, tetapi buahnya sudah mulai tampak di BBJ. Seperti para pelaku kopi di bursa London, sudah mulai masuk ke BBJ," ucapnya.

"Contoh lain, ketika peristiwa *Brexit* (Inggris keluar dari persekutuan Uni Eropa), volume kontrak berjangka emas di JFX pada H-3 hingga H+1 naik sampai 300 % perhari dari target harian. Melihat peristiwa itu, saya sempat berseloroh diinternal mengharapkan efek *Brexit* jangan cepat berlalu," tutur Paulus.

Target

Masuknya dana *tax amnesty* ke industri perdagangan berjangka komoditi dipastikan akan meningkatkan kapitalisasi di bursa berjangka. Meski demikian, rasa pesimis masih terbersit dibenak Dirut JFX Stephanus Paulus Lumintang.

Menurut pandangannya, hal itu disebabkan industri perdagangan berjangka komoditi masih tertinggal dibandingkan industri lainnya. "Industri

ini sepertinya hanya kecipratan saja. Tetapi kalau semua pelaku pasar agresif, kerja keras dan mendapat dukungan dari otoritas, saya cukup yakin ditahap awal bisa menggaet sekitar Rp 5 triliun," katanya.

"Peningkatan kapitalisasi pasar itu nantinya bisa dilihat di awal tahun 2017. Sebab, kalau sesuai rencana industri ini baru bisa mengelola dana *tax amnesty* pada awal November 2016, pasca ditetapkannya sejumlah peraturan dan perusahaan pialang diberi izin sebagai pengelola dana *tax amnesty*," terang Paulus.

Sementara itu, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu, mengungkapkan, tren pertumbuhan volume transaksi bursa berjangka terus tampak positif dari tahun ke tahun. "Kalau tren itu terjaga, target kami di tahun 2019, kapitalisasi bursa berjangka bisa menembus Rp 99,55 triliun dengan volume 10,81 juta lot pertahun," jelas Pantas Lumban Batu.

Di sisi lain, Pantas Lumban Batu mengungkapkan, volume transaksi kontrak berjangka pada Juni 2016 mencapai 3,59 juta lot, tumbuh 15,99% (*year on year*) dari posisi 3,09 juta lot. Adapun nilai kontrak berjangka pada paruh pertama 2016 mencapai Rp 50,62 triliun, atau tumbuh 0,23 % (YoY) dari posisi Rp 50,5 triliun.

Sedangkan transaksi multilateral hingga Juni 2016 mencapai 719.663 lot, tumbuh 24,22 % dibandingkan periode yang sama 2015 sebesar 579.342 lot. Namun, nilai transaksi multilateral paruh pertama 2016 tercatat sebesar Rp 8,95 triliun, turun 0,06 % (YoY) dari posisi Rp 8,96 triliun. Dan sepanjang 2015, total transaksi multilateral tercatat sebesar Rp 19,3 triliun atau meningkat 15 % dari 2014 yang sebesar Rp 16,56 triliun. "Tetapi di tahun 2016 ini kami yakin total transaksi multilateral bisa naik lebih dari 16 %," ucap Pantas Lumban Batu. 📌



Pasar Fisik Timah BKDI keberadaannya semakin diperhitungkan. Ditambah lagi nantinya akan berdiri pusat logistik timah nasional. Perlahan tapi pasti, pasar fisik ini mulai menjadi acuan harga timah global.

Pasar Fisik Timah yang diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI mulai membuahkan hasil positif. Adanya pasar fisik ini semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama timah dunia. Adalah sangat wajar jika transaksi perdagangannya belum cukup optimal. Maklum, pasar fisik ini baru diluncurkan pada 30 Agustus 2013 silam.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, mengakui, Pasar Fisik Timah memang sangat dibutuhkan Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua setelah Tiongkok, dengan pangsa produksi sebesar 26 % dari total produksi dunia. Rata-rata produksinya bisa mencapai 90.000 ton yang sebagian besar ditambang dari Provinsi Bangka Belitung. Indonesia juga tercatat sebagai eksportir timah nomor satu di dunia yang menguasai 70 % pangsa pasar dunia.

Tak hanya itu, kualitas bijih timah di Indonesia terbilang yang terbaik di dunia dengan kemurnian 99,9 % dan bebas timbal. Maka tak heran timah Indonesia menjadi buruan dari pabrikan ponsel atau produk elektronik berlabel internasional.

"Pembeli utama timah kita itu Apple dan Samsung," kata Bachrul dalam keterangannya kepada media di Capitol Building, Jakarta, 18 Agustus 2016, lalu.

Dengan posisi tersebut, sebenarnya sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi sayangnya, Indonesia masih belum berdaulat dalam menetapkan harga. Selama ini, harga timah Indonesia mengacu pada harga yang terjadi di London Metal Exchange- LME atau The Kuala Lumpur Tin Market- KLTM. "Harga justru ditentukan oleh negara lain yang tidak punya barangnya," ujar Bachrul.

Karena itu, lahirnya Pasar Fisik Timah di BKDI atau dikenal juga *Indonesian*

Commodity & Derivatives Exchange- ICDX memberikan warna baru bagi Indonesia. Meskipun kata Bachrul, transaksinya masih kecil, tapi secara perlahan mulai menjadi acuan harga timah dunia.

"Dengan kita punya acuan bursa sendiri sebagai produsen timah, kita bukan hanya *price taker* saja, tapi sudah mulai jadi *price maker*," tegasnya.

Selain itu, menurut Bachrul, Indonesia pernah mau diboikot karena tambang timahnya dianggap tidak ramah lingkungan. Nah, dengan hadirnya pasar fisik ini, selain bisa menentukan harga sendiri, juga dapat memberikan jaminan timah Indonesia ditambang dengan prinsip keberlanjutan- *sustainable*.

"Jadi yang diperjual-belikan lewat BKDI ini harus *clear and clean* dulu. Setiap produksi timah akan diverifikasi sumbernya dari mana asalnya, siapa penambangnya, dan akan dilakukan verifikasi oleh surveyor," jelas Bachrul.

"Kalau tidak lolos, timah tidak bisa dijual di bursa BKDI. Dengan demikian kita bisa mencegah *illegal mining*, jadi tuntutan timah yang ramah lingkungan dan *sustainable* bisa kita penuhi," tegas Bachrul.

Adanya Pasar Fisik Timah, kata Bachrul, sangat menguntungkan penambang timah domestik dalam memastikan harga. Selain itu, pemerintah daerah juga bisa menghitung penerimaan daerah dari tambang timah di wilayahnya secara lebih pasti. "Harga di bursa luar sangat fluktuatif, dengan timah dijual di BKDI, Pemda sudah tahu harga sehingga tahu penerimaan royalti nanti sudah bisa diprediksi."

Dia menambahkan, *trader* komoditas di pasar global seperti LME juga terkadang tidak memiliki fisik dari timah yang dijualnya. Hal inilah yang membuat pasar komoditas begitu bergejolak. "Kita 'kan jelas ada barangnya. Mereka di sana kebanyakan *trader*. Dengan punya bursa sendiri, ada kepastian suplai timah dan jaminan kualitas, serta transparansi harga," jelas Bachrul.

Sementara itu, Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja mengatakan, meski belum dominan dalam penentuan harga timah, setidaknya keberadaan Pasar Fisik Timah membuat harga timah yang diproduksi di dalam negeri tak lagi fluktuatif karena mengikuti patokan pasar bursa luar.

"Dulu harga timah nggak masuk akal, bagaimana bisa kita suplai 70 % timah tapi tak punya andil harga. Sebelum ada BKDI, volatilitas harga 25-30 %, sangat tinggi bukan? Sekarang bisa lebih stabil di kisaran 15 % volatilitasnya. Saat ini Indonesia sudah jadi barometer harga timah global. Kalau dulu kita bergantung pada bursa timah negara lain. Jadi dulu lucu, kalau mereka tidak punya sumber daya mineral tapi mereka yang menentukan harga," papar Megain.

Data BKDI mencatat, Pasar Fisik Timah telah memperdagangkan 18.000 ton timah atau alumina pada tahun 2013. Kemudian, di 2014 naik menjadi 54.000 ton, 2015 naik lagi menjadi 70.000 ton. Adapun periode Januari-Juli 2016 sudah mencapai 32.600 ton. Selain itu, saat ini sudah ada 63 perusahaan terdaftar di Pasar Fisik Timah, dengan 34 penjual dan 29 pembeli.

Logistik Berikat

Untuk memperkuat keberadaan Pasar Fisik Timah, rencananya akan dibangun kawasan logistik berikat yang nantinya disebut ICDX Logistik Berikat- ILB. Keberadaan ILB tersebut sebagai kawasan penyimpanan timah. Lokasinya terletak di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara dengan lahan seluas 15.141 meter persegi. Untuk luas bangunan gudangnya sekitar 1.200 meter persegi.

Direktur Utama ILB, Henry Chandra, menjelaskan, kapasitas gudang timah ini menggunakan acuan transaksi ekspor timah BKDI tahun 2015 lalu, yakni dikisaran 68.000-69.000 ton. "Timah yang diproduksi dari dalam negeri bakal dijual-belikan melalui bursa komoditi ICDX dan barangnya akan disimpan di ILB," tutur Hendry.

Henry menambahkan, ILB akan siap beroperasi pada awal tahun 2017 mendatang. Saat ini hanya tinggal perampungan aturan yang rencananya akan terselesaikan pada Oktober 2016 mendatang. "Setelah resmi diperbolehkan, hanya butuh waktu dua sampai tiga bulan untuk bisa beroperasi," katanya.

Terkait itu, Megain Widjaja, mengatakan, nantinya kehadiran pusat logistik berikat ini bisa membuat pelaku pasar lebih banyak bertransaksi melalui bursa Indonesia. Tujuan akhirnya adalah upaya untuk membentuk harga jual timah global di Indonesia.

Dia juga bilang, timah menjadi komoditas perdana yang disiapkan ILB. Ke depan juga akan dibangun gudang untuk komoditas lainnya. "Ini tahap awal, ini untuk menampung timah. Nanti pada kemudian hari dapat dikembangkan untuk komoditas lain," ujar Megain Widjaja.

Tin Conference

Untuk mendorong aktivitas perdagangan produk timah di Indonesia, BKDI menjadwalkan akan menggelar *Indonesia Tin Conference and Exhibition- ITCE*. Event ITCE ini merupakan kegiatan tahunan diselenggarakan BKDI, dan tahun ini sudah memasuki tahun ketiga.

"ITCE 2016 akan kami gelar di Bali pada 18-20 September 2016 mendatang," ujar Megain Widjaja.

Adapun tema yang diusung tambah Megain, yaitu, "Menavigasi Indonesia untuk Menjadi Pemimpin Dunia Dalam Industri Timah".

ITCE direncanakan menampilkan lebih dari 10 pembicara terkemuka dunia dan mendatangkan lebih dari 250 praktisioner timah dari Jepang, Korea, Inggris, Amerika, China, Thailand, Malaysia, Russia, Belgia, Vietnam, Singapura, Arab Saudi, Jerman, dan Portugal. 



PEKI Sarana Pemasaran Kopi Nasional

Bappebti dan bursa berjangka gagasan Portal Ekspor Kopi Indonesia- PEKI sebagai sarana pusat registrasi kontrak kopi tujuan ekspor.

Indonesia sebagai salah satu produsen kopi di dunia dengan kualitas digdaya menjadi incaran empuk para pelaku asing. Karena itu pelaku eksportir kopi nasional kerap menghadapi persaingan tak sehat dilapangan. Bahkan dampak negatif dari persaingan tak sehat itu menjurus penguasaan pasar sehingga pemerintah sulit mengatur mekanisme perdagangan.

Gambaran nyata perdagangan kopi di dalam negeri itu, dituturkan Ketua Gabungan Eksportir Kopi Indonesia- GAEKI, Moenardji Soedargo, dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi dan Direksi Bursa Berjangka Jakarta- BBJ, di Jakarta, baru-baru ini.

"Sejak dekade 90-an kegiatan

eksportasi kopi mengalami deregulasi dan perusahaan asing diizinkan menjadi eksportir dan bersaing dengan para eksportir kopi nasional. Padahal di saat bersamaan, eksportir Penanaman Modal Asing- PMA tersebut juga bertindak sebagai pembeli sehingga terjadi iklim persaingan yang tidak sehat bagi eksportir nasional," kata Moenardji Soedargo.

Menjawab keluhan tersebut, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, menyatakan pihaknya tengah menganalisa kemungkinan terobosan solusi melalui konsep pendaftaran kontrak kopi- *trade registration* untuk tujuan ekspor, dan pembentukan harga- *price discovery* di bursa berjangka. "Terobosan itu nantinya akan dilakukan oleh bursa berjangka dengan membentuk Portal Ekspor Kopi

Indonesia- PEKI," ungkap Bachrul Chairi.

Melalui PEKI, tambahnya, pemerintah dan pelaku usaha kopi akan memiliki informasi dan data tentang potensi ekspor kopi. Di samping itu, PEKI dapat memetakan perdagangan kopi di Indonesia.

Lebih jauh diutarakan Bachrul, dengan tersedianya data tersebut, eksportir kopi nasional akan dapat menentukan strategi pemasaran kopi untuk menghadapi perusahaan asing yang mampu mengendalikan perdagangan melalui manipulasi- *mark-up* informasi volume pasar ekspor kopi Indonesia.

"Sementara dengan pembentukan harga kopi di bursa berjangka akan membantu petani dan para eksportir dapat memberikan harga acuan- *price reference* dalam menentukan harga jual kopinya," jelasnya.

Manfaat

Terselenggaranya registrasi kontrak kopi di bursa berjangka untuk tujuan ekspor menyimpan sejumlah manfaat ekonomi. Diantaranya, dapat diperoleh data *agregate* komitmen kontrak, jenis, kualitas dan bulan pengapalan atas ekspor kopi nasional. Data yang terdapat pada portal tersebut juga dapat memberikan gambaran dimensi risiko atas kontrak *forward* ekspor bagi para pelaku ekspor nantinya.

Selain itu, tidak lagi terjadi kesalahan informasi yang ada di pasar, karena eksportir dapat mengetahui sudah atau belum terjadinya kejenuhan kopi di pasar. Sehingga sesama eksportir tidak lagi terjadi saling banting harga untuk memenuhi 'kontrak ekspor' yang dimanipulatif, utamanya oleh perusahaan asing yang jumlah sedikit tetapi sangat menentukan tersebut.

"Manfaat lainnya, memberikan efek domino yang konstruktif, yaitu semakin familarnya pelaku ekspor dengan portal maupun *platform* bursa berjangka sehingga selanjutnya akan dapat menggerakkan ketertarikan pelaku untuk mendayagunakan produk jasa lindung



Kepala Bappebti, Bachrul Chairi.

nilai yang tersedia di bursa berjangka tersebut."

Selanjutnya, sambung Bachrul, registrasi kontrak kopi bisa mencegah terjadinya manipulasi perdagangan antara dua perusahaan yang terafiliasi. Ia mensinyalir bahwa harga kontrak jual antara perusahaan eksportir PMA dan pembeli yang notabene adalah perusahaan prinsipalnya di luar negeri ini menggunakan harga yang tidak sesuai dengan tingkatan pasar yang sengaja dibuat rendah, dengan dugaan untuk melakukan *transfer pricing* yang tentunya akan merugikan negara.

Terkait itu, Direktur Utama BBJ, Stephanus Paulus Lumintang, menyatakan, pihaknya akan siap melaksanakan pendaftaran- *registration* kontrak kopi tujuan ekspor dan perdagangan kopi apabila telah telah disetujui oleh pemerintah (Bappebti)

dan memenuhi kebutuhan industri kopi Indonesia.

"Kami sudah siap sebagai wadah yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran-*registration* kontrak kopi tujuan ekspor dan perdagangan kopi. Semoga dengan adanya pasar kopi ini, aksi para spekulan dapat diredam dan harga kopi dapat kembali menjadi lebih wajar dan *fair* karena mengikuti prinsip dasar *supply and demand*," kata Paulus.

Pendaftaran ekspor kopi melalui PEKI ini akan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem Intrade Kementerian Perdagangan untuk pelaksanaan ekspor kopi. Sedangkan, perdagangan kopi akan menggunakan sistem lelang *on line* untuk menentukan pembentukan harga penjual dan pembeli terbaik. 





Perum Jamkrindo membidik penjaminan Sistem Resi Gudang- SRG di Sumatera Selatan. Nantinya, penjaminan SRG itu dilakukan secara online, agar semua stakeholder dapat memonitor pelaksanaannya.

Penjaminan untuk SRG hingga saat ini memang belum berjalan. Meski begitu, Perum Jamkrindo yang telah resmi ditunjuk sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG terus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Sebelum penjaminan SRG berjalan, kami optimalkan sosialisasi. Jadi dengan sosialisasi, diharapkan makin banyak masyarakat yang memanfaatkan instrumen ini," demikian kata Kepala Bappebti, Bachrul Chairi yang menjadi *keynote speaker* di acara sosialisasi SRG yang diselenggarakan Perum Jamkrindo, di Palembang, Rabu, 10 Agustus 2016, lalu.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, mengatakan, pihaknya sangat tertarik

dengan keberadaan gudang SRG yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

"Provinsi ini sangat potensial untuk mendapat jaminan SRG dengan komoditas andalan berupa gabah, karet dan kopi. Karena itu, kami siap memberi penjaminan sesuai dengan kebutuhan petani yang ada di Sumsel," ujar Diding.

Beliau berharap penjaminan SRG bisa berjalan mulai awal tahun depan. "Kita ingin sosialisasi selesai akhir tahun ini, dan penjaminan SRG bisa berjalan di awal tahun depan. Tapi itu pun tergantung DPR dan pemerintah kapan akan menyetujui Penyerahan Modal Negara- PMN untuk SRG," kata Diding.

Sebagai informasi, Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PP Nomor 1 tahun 2016, pendanaan pertama kali LPP-SRG diperoleh dari PMN yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Lembaga Pelaksana mulai melaksanakan kegiatan penjaminan SRG terhitung sejak menerima modal dari pemerintah," jelasnya.

Diding menyampaikan beberapa pertimbangan perlunya PMN pada Perum Jamkrindo. Hal ini karena perlu dibentuk Dana Jaminan SRG- *indemnity fund* sebagai jaminan pelaksanaan *-performance guarantee* atas kewajiban Pengelola Gudang. Selain itu, dana Jaminan SRG berfungsi sebagai sumber pembayaran klaim apabila terdapat Pengelola Gudang yang mengalami kegagalan- wanprestasi terhadap pemegang Resi Gudang dan pemegang Hak Jaminan.

"Apabila terjadi kegagalan Pengelola Gudang dalam proses penyelesaian

transaksi resi gudang, maka para pelaku dalam SRG masih tetap percaya dengan sistem ini karena tetap terlindungi dengan penggantian maksimum 100 % dari nilai barang atau komoditi yang dimilikinya," jelas Diding.

Meski begitu, untuk meminimalkan resiko yang mungkin akan terjadi, Perum Jamkrindo memiliki syarat tertentu. Diantaranya, Pengelola Gudang yang dapat menjaminkan resi gudangnya kepada Perum Jamkrindo adalah Pengelola Gudang yang telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan gudang, tidak memiliki catatan hitam, tidak pernah wanprestasi kepada perbankan, serta tidak memiliki isu negatif yang terkait dengan proses hukum.

Dia menambahkan, dana PMN juga untuk meningkatkan peran Perum Jamkrindo selaku Lembaga Penjamin bagi kelompok tani ataupun Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) dan memperkuat modal serta meningkatkan kapasitas penjaminan- *gearing ratio* Perum Jamkrindo. Sehingga, BUMN ini bertambah sehat dan kuat dalam mendukung berjalannya sistem penjaminan bagi kelompok tani maupun UMKM.

Di samping itu, untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada Pengelola Gudang, Perum Jamkrindo akan menerapkan penjaminan SRG secara online. Dengan itu, stakeholder dapat ikut memonitor pelaksanaan penjaminan SRG, sehingga tata kelola penjaminan resi gudang mengacu pada prinsip *good corporate governance*.

"Laporan penjaminan resi gudang dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas," terang Diding S. Anwar.

Penyerapan KUR

Selain mensosialisasikan SRG, Perum Jamkrindo juga mensosialisasikan tentang Kredit Usaha Rakyat- KUR. Wakil ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafizs Tohir yang hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ini, tak ketinggalan



meminta agar program KUR lebih ditingkatkan lagi sosialisasinya, terutama untuk para petani. "Sebab, sampai saat ini penyerapan dana KUR untuk Sumsel baru sekitar 50 %," katanya.

"Program ini sangat baik. Selain dapat menguatkan sistem perekonomian di Indonesia yang masih belum maksimal, program KUR juga bisa membantu petani maupun UKM untuk meninggalkan para rentenir yang kerap membelit mereka," ujar Achmad Hafizs.

Untuk itu, Achmad Hafizs pun berharap program ini harus diperkuat, agar harga jual hasil produksi masyarakat lebih tinggi, dan diiringi daya beli masyarakat yang kembali membaik.

Menurut Achmad Hafizs, nilai serapan dana KUR secara nasional sebesar Rp 61 triliun dari proyeksi Rp 120 triliun. Sementara itu, untuk Sumsel terhitung masih rendah, baru sebesar Rp 1,16 triliun. Angka itu berbeda jauh dibandingkan Sulawesi Selatan yang mencapai Rp 3,3 triliun. "Harusnya Sumsel lebih besar atau minimal sama dengan Sulsel, karena dari segi jumlah penduduk, maupun kondisi wilayah antara Sumsel dengan Sulsel tidak jauh beda," ujarnya.

Masih minimnya penyerapan dana KUR ini, lanjut Achmad Hafizs Tohir, karena kurangnya sosialisasi mengenai program

tersebut. "Saya yakin akan banyak masyarakat yang mau memanfaatkan KUR jika mereka mengetahui kalau KUR ini merupakan program pemerintah untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah permodalan dengan bunga yang sangat ringan," ucapnya.

Dia juga meminta BUMN yang ada bisa segera melakukan gerak cepat untuk turut serta melaksanakan Instruksi Presiden dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. "Untuk BUMN yang ada, saya minta segera membuat program SRG, sehingga petani bisa menggunakan gudang tersebut untuk menyimpan hasil panennya, sampai harga jual lebih menguntungkan," ungkapnya.

Tohir menambahkan, sistem ekonomi di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Hal ini terlihat dengan adanya dampak harga jual yang tinggi dan kemampuan beli masyarakat yang terus menurun. "Sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, perputaran roda ekonomi Indonesia harus dapat berlangsung maksimal sehingga otomatis akan memiliki efek domino yang positif kepada kesejahteraan rakyat," tutup Achmad Hafizs Tohir.



Bappebti Audiensi dengan BAKTI

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi melakukan audiensi dengan pengurus dan para Arbiter Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) di Gedung Bappebti Jakarta, Selasa (30/08). Hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Sri Hariyati, dan Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti Pantas Lumban Batu.

Dalam pertemuan ini, Kepala Bappebti menyampaikan arah pengembangan industri PBK, termasuk target untuk mengurangi tingkat pengaduan di bidang PBK hingga 50%. Melalui audiensi ini, Bappebti mengharapkan agar pengurus dan para arbiter BAKTI dapat menyampaikan perkembangan di lapangan dan memberikan masukan untuk pengembangan industri PBK.

Hadir sebagai peserta rapat adalah pengurus BAKTI, 12 orang Arbiter BAKTI, Ketua Aspebtindo, Dirut PT Indonesia Clearing House, Direktur PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, Direktur PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), dan perwakilan PT Bursa Berjangka Jakarta.



Pelatihan Wartawan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi Yogyakarta, 12 - 14 Agustus 2016



Bappebti Raih 3 Penghargaan Wilayah Tertib Administrasi Tahun 2016

Bappebti meraih 3 piagam penghargaan WTA untuk kategori Dukungan Manajemen (Sekretariat Bappebti) dan Layanan Publik (Biro Pengawasan Pasar Berjangka & Fisik, serta Biro Pembinaan & Pengawasan Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang Komoditas). Penghargaan ini merupakan penghargaan yang keempat kalinya secara berturut-turut sampai dengan Tahun 2016.

WTA merupakan penilaian atas unit-unit kerja guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan bebas dari korupsi (*clean government*) di lingkungan Kemendag.

Penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan HUT RI ke-71, di Jakarta, 17 Agustus 2016. Adapun piagamnya diserahkan langsung oleh Mendag Enggartiasno Lukita kepada Sekretaris Bappebti, Didi Sumedi; Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka & Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu; dan Kepala Biro Pembinaan & Pengawasan Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati.



Sertijab Pejabat Eselon II di Lingkungan Bappebti

Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan RI, Bachrul Chairi memimpin prosesi serah terima jabatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Bappebti, di ruang rapat gedung Bappebti, Senin (01/08).

Serah terima jabatan dilakukan dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Mardjoko yang saat ini menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Didi Sumedi disamping jabatannya sebagai Sekretaris Bappebti juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti sampai dengan diangkatnya Pejabat Definitif baru.

Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon II Bappebti beserta Pegawai di lingkungan Bappebti.



Mendag Enggar Kunjungi ‘Markas’ Bappebti



Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita didampingi Irjen Kemendag, Karyanto Suprih, Staf Khusus Mendag, Sutriono Edi dan Kepala Biro Umum Kemendag Supardjo mengunjungi Gedung Bappebti di Jakarta, pada 19 Agustus 2016, lalu. Kunjungan Menteri Perdagangan itu disambut oleh Kepala Bappebti Bachrul

Chairi dan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati dan Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu.

Selain bertegur sapa dan beramah tamah dengan sejumlah staf dan karyawan Bappebti, Mendag Enggartiasto juga mengamati alur pelayanan perizinan di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan- UPTP, mendapatkan penjelasan mengenai Sistem Pengawasan Tunggal- SPT pada Sistem Perdagangan Alternatif-SPA.

Di samping itu, Mendag juga mengamati perangkat pengawasan online Sistem Resi Gudang- SRG yang terpasang di seluruh Gudang SRG yang tersebar di sejumlah daerah. Serta, *dashboard* Pasar Lelang Komoditas- PLK yang terhubung dengan pihak penyelenggara.

Pada kesempatan itu juga, Mendag Enggartiasto berkesempatan mengunjungi kantor *International Pepper Community- IPC* dan *Asian & Pacific Coconut Community- APCC* yang berada di Gedung Bappebti. Dan dilanjutkan dengan ramah tamah bersama pengurus IPC dan APCC. 📍

Bappebti Optimis Transaksi Multilateral 2016 Naik 16 %

Bappebti menargetkan peningkatan transaksi multilateral di kisaran 16 % di tahun 2016. Pada 2015 tercatat total transaksi multilateral sebesar Rp 19,3 triliun atau meningkat 15 % dari 2014 yang tercatat sebesar Rp 16,56 triliun.

Untuk mencapai target peningkatan transaksi kontrak multilateral 16 %, Bappebti telah menerapkan beberapa strategi. Diantaranya, peningkatan integrasi sistem perdagangan alternatif melalui penyeragaman peraturan perdagangan- *trading rules* dan penyempurnaan sistem perdagangan, melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi perdagangan berjangka baik bagi pelaku usaha, media massa, maupun masyarakat umum.

“Dengan beberapa strategi itu, kami yakin di 2016 ini kontrak multilateral bisa naik mencapai 16 %,” ucap Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti, Pantas Lumban Batu, di sela-sela Pelatihan Jurnalis Memahami *Margin, Hedging* dan *Capital* pada Perdagangan Berjangka Komoditi, di

Yogyakarta, Jumat, 12 Agustus 2016, lalu.

“Kami optimis industri perdagangan berjangka di tahun ini akan menggeliat dan meningkat dibanding tahun lalu. Apalagi tahun ini ada dana repatriasi dari amnesti pajak yang masuk ke Indonesia,” tegas Pantas Lumban Batu.

Sebagai gambaran berdasarkan data Bappebti, volume transaksi multilateral pada Juni 2016 mencapai 719.663 lot, tumbuh 24,22 % dibandingkan periode yang sama 2015 sebesar 579.342 lot. Adapun nilai transaksi multilateral pada Juni 2016 senilai Rp 8,95 triliun, turun 0,06 % secara year on year dari posisi Rp 8,96 triliun. Sedangkan volume transaksi kontrak berjangka bilateral pada Juni 2016 mencapai 3,59 juta lot, tumbuh 15,99 % *year on year* dari posisi 3,09 juta lot. Adapun nilainya pada paruh pertama 2016 itu mencapai Rp 50,62 triliun, atau tumbuh 0,23 % secara *year on year* dari posisi Rp 50,5 triliun di tahun 2015. 📍

JFX Melaju Dalam Era Digital Marketing

Jakarta Futures Exchange- JFX kembali melakukan terobosan dalam teknologi informasi dengan perubahan website yang lebih apik dan aplikatif bagi pengunjungnya. Website JFX yang terbaru itu (www.jfx.co.id), selain disempurnakan dari sisi keamanannya juga lebih *friendly* dengan tambahan fitur media sosial yang dapat diakses dengan smartphone.

“Kami memandang bahwa dunia *online* merupakan salah satu *channel* yang efektif dalam mengkomunikasikan *value* proposisi perusahaan kepada industri secara khusus dan kepada *stakeholder* secara umum,” jelas Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang dalam keterangannya kepada media pada 26 Agustus 2016, lalu.

Ditambahkan Paulus, perubahan website itu juga dalam rangka pendewasaan JFX yang telah menginjak usia ke 17 tahun di tahun ini. “Sebab itu, kami akan terus berinisiatif dalam pengembangan pasar, produk dan sistem aplikasi transaksi,” katanya.

“Dengan tampilan baru website JFX itu bisa diartikan juga bahwa JFX sangat peduli dan peka terhadap tren pasar serta menjawab kebutuhan industri. Karena itu, pengunjung pun



dengan mudah menjelajahi website JFX, yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi *gadget* dengan tampilan yang responsif,” terang Paulus.

Di samping itu, kata Paulus, pengunjung juga dapat dengan mudah menemukan data harga, baik *live price* maupun *historical price* pada halaman utama yang masing-masing disajikan dalam bentuk *running*- data serta grafik yang interaktif. 📍

GKIB Siap Berkompetisi Dongkrak Kontrak Berjangka

Kontrak berjangka multilateral seharusnya menjadi bagian dari portofolio sebuah perusahaan pialang berjangka. Oleh karena itu, kewajiban minimal transaksi kontrak berjangka multilateral sebesar 5 % sebagai mana diatur tidak menjadi beban bagi perusahaan pialang berjangka.

Demikian antara lain sambutan Kepala Bappebti Bachrul Chairi dalam peluncuran PT Global Kapital Indonesia Berjangka- GKIB sebagai perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange- JFX dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI, pada 23 Agustus 2016, di Jakarta.

“Jika kontrak berjangka multilateral menjadi portofolio penting dari sebuah perusahaan pialang, pastinya akan membuat masyarakat atau calon investor menjadi lebih *confident* terhadap industri ini. Maka saya berharap GKIB menjadi bagian dari industri perdagangan berjangka komoditi yang ikut menumbuhkembangkan *trust* dan *confident* masyarakat itu,” tegas Bahcrul.

Jadi saya pikir, tambah Bachrul Chairi, jika semua para pelaku dapat menciptakan *trust* dan *confident* terhadap industri ini, maka untuk memenuhi ketentuan minimal transaksi kontrak multilateral sebesar 5 % tidak menjadi beban.

Dirut GKIB, M. Ali Jaya dalam keterangannya mengatakan, GKIB akan diarahkan sebagai perusahaan pialang berjangka yang mengandalkan kemajuan teknologi informasi. “Melalui *digital marketing* kami akan membangun *brand image* GKIB yang terbaik, terpercaya dan *friendly*,” katanya.

Dia juga berharap GKIB bisa mendapatkan nasabah yang sudah berpengalaman. Sebab, nasabah yang masih awam cenderung menimbulkan banyak masalah. “Secara pribadi saya lebih cenderung membidik nasabah ritel dan berpengalaman daripada yang nasabah besar. Karena risikonya lebih kecil, walaupun komisinya kecil. Tetapi konsekuensinya tetap sama di mata *self regulatory organization*- SRO dan otoritas,” ujar Ali Jaya. 📍

2016 Indonesia Surplus Jagung

Indonesia tahun ini diprediksi mengalami surplus produksi jagung. Prediksi Kementerian Pertanian itu didasarkan perhitungan kenaikan produksi dari luas tanaman baru di tahun 2016. "Hitungan kami sudah surplus. Itu setelah ada tambahan tanam 1,5 juta hektar dari program APBN tahun lalu. Taruhlah 1 hektar bisa produksi 4 ton, itu artinya ada tambahan 6 juta ton tahun ini," kata Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Sembiring, Kementan melalui dana APBN-P 2016 akan menambah luas tanam baru di bulan Agustus-Oktober seluas 724.000 hektar, dan bantuan pengadaan benih dan pupuk. "Artinya dengan tambahan luas tanam itu, nggak ada lagi cerita impor jagung. Dengan program itu kita targetkan produksi jagung minimum sudah 21,5 juta ton. Bahkan bisa mencapai 24 juta ton," ucapnya.

Dari catatan Sembiring, produksi jagung 2016 dipastikan mencukupi kebutuhan industri pakan yang berkisar 750.000 ton per bulan dan kebutuhan jagung nasional 1,55 juta ton per bulan. Kendati demikian, khusus untuk kebutuhan industri pakan, masalahnya masih pada kesulitan distribusi jagung petani sampai ke pabrik pakan. Hal itu disebabkan sentra produksi jagung kebanyakan berada di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo, NTB, NTT, dan lainnya.



"Masalah distribusi kita yang masih harus perbaiki. Pabrik pakan banyak di Jawa, tapi jagungnya di luar Jawa. Tol laut ini yang didorong, misalnya muatan kapal dari Jawa ke Merauke kan penuh, tapi dari Merauke ke Jawa muatan kosong," pungkas Hasil.

Natuna Kembangkan Industri Rumput Laut



Pemerintah terus berupaya untuk memajukan dan membangun pulau-pulau terdepan Indonesia, salah satunya pengembangan industri komoditi rumput laut melalui Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu- PSKPT di Kab. Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengembangkan budidaya bahan baku agar-agar, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya-DJPB mengalokasikan bantuan berupa kebun bibit dan budidaya rumput laut.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan

Perikanan, Slamet Soebjakto, mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan kebun bibit rumput laut seluas 2,5 ha dan percontohan budidaya rumput laut seluas 58 ha yang sedang dibangun dan dikelola oleh 20 kelompok.

"Petani akan didukung dengan bibit unggul kultur jaringan yang terbukti tumbuh lebih cepat, tahan terhadap perubahan salinitas dan kadar *carrageenan*-nya lebih tinggi," katanya.

Potensi budidaya rumput laut di Kab. Natuna mencapai 4.757,5 ha, namun yang terpakai baru sekitar 56 ha atau 0,01 %. Slamet menambahkan bila lahan di sana dimanfaatkan secara optimal, maka hasil produksinya bisa mencapai 150.000 ton basah atau 22.000 ton kering per tahun atau setara dengan Rp 176 miliar.

Untuk menyerap produksi rumput laut, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan PT Perindo. "Tentunya dengan kualitas yang bagus serta kuantitas yang memadai dan dengan harga yang telah disepakati," kata Slamet Soebjakto.

Sekedar informasi, data statistik tahun 2015 tercatat produksi rumput laut nasional mencapai 9,9 juta ton naik sekitar 18,84 % per tahun dibandingkan produksi tahun 2011 sebesar 5,2 juta ton.

Perum Jamkrindo Digs Bulgarian's Idemnity Fund

To get the whole pictures on the implementation of Warehouse Receipt system which has completed with indemnity fund instrument, Credit Guarantee Corporation of Indonesia (Jamkrindo) is digging Bulgarian's success. Bulgarian government has programmed Warehouse Receipt System since 1997 when at that time there were price volatility and scarcity of food commodities.

"The Bulgarian's success in implementing Warehouse Receipt system has interested us to learn it more. Field trip and direct discussion with the people in Bulgaria have been considered giving enough information for Credit Guarantee Corporation in Indonesia to develop warehouse receipt system in the country," Diding S. Anwar, The President Director of Credit Guarantee Corporation of Indonesia to media recently.

Diding also added that the focus of CGCI on visiting Bulgaria is to get the picture of indemnity fund. As we all know, CGCI received the assignment from the government as the implementing agency of Warehouse Receipt System guarantor. "Besides that, we also eager to get some references to prepare some related issues of the implementation of warehouse receipt system instrument.

According to Diding, Bulgaria succeed in implementing warehouse receipt system because all farmers were obligated to store their harvest in the warehouse therefore national food availability and price stability of commodity can be monitored



"From the visit result it is concluded that the implementation of warehouse receipt system in Indonesia with the one in Bulgaria has different purpose. However, the process was not completely different so that the implementation of indemnity fund in Indonesia will not experience any difficulty," Diding S.Anwar added.

7 Institutions Prevent Fake Investment

Investment Vigilant Task Force that consist of related ministry and institutions are regaining their commitment strength and establishing legal protection for their main task as Investment Vigilant Task Force. The institutions that joined the task force are Financial service Authority also known as Otoritas Jasa Keuangan – OJK, Commodity Futures Trading Regulatory Agency- CoFTRA, Ministry of Trade, Ministry of Communication and Informatics; State Ministryfor Cooperatives Small and Medium Enterprises; Attorney General; Indonesian State Police; and Capital Investment Coordinating Board also known as BKPM.

The head chief of Investment Vigilant Task Force, Togam Lumban Tobing, on his explanation stated that the revitalization of the task execution of Investment Vigilant Task Force are including; First, preventive. This action is including coordination between members to increase education and understanding on monetary transaction scope that potentially harmful for the society.

Second, Curative. The action is including collaboration in issuing crowd permit or other event management for investment offer.

Third, repressive action. It is including taking legal action toward laws & policy breaches.

According to Togam L. Tobing, to avoid the "fake investment" people can simply learn 2 steps. They are; looking at the legality side and whether the investment profit offer is logic. "To know the legality of company who offers investment, they can access www.waspadainvestasi.ojk.do.id/," Togam said.

"The second step is being logic. At any place, any investment business will not be possible to offer profit above the monetary institution's standard. Therefore, if there is any investment offer that promise for big profit and various bonuses, you should be aware and suspicious on its legality," Togam L. Tobing emphasized.



Hamonangan Sinaga,
Tanjung Karang, Lampung
082115358xxxx

Tanya;
Kepada Yth. Bappebti;
Sejak tahun 2013 lalu saya melanjutkan usaha yang puluhan tahun lalu dirintis oleh orang tua. Dan usaha tersebut cukup berkembang, sehingga banyak diketahui oleh publik. Dalam dua tahun ini, saya cukup terganggu dengan banyaknya pihak yang menghubungi saya baik melalui handphone maupun datang langsung ke tempat usaha kami yang menawarkan investasi emas dan forex. Dalam penjelasannya, investasi itu menjanjikan keuntungan tetap.
Karena merasa curiga, saya berusaha mencari informasi tentang legalitas perusahaan tersebut keberbagai instansi. Namun, saya tidak menemukan perusahaan tersebut berada di bawah pengawasan OJK atau pun Bappebti. Mohon penjelasannya.

Jawaban:
Yth. Bapak Hamonangan Sinaga, sebelumnya kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi Bapak berbagai informasi kepada Bappebti. Berikut ini penjelasannya;
1. Data yang Bapak sampaikan sudah dalam penelitian PPNs Bappebti untuk ditindaklanjuti.
2. Jika legalitas perusahaan yang dimaksud tidak dalam pengawasan OJK atau pun Bappebti, maka sebaiknya Bapak menghindari penawaran tersebut.
3. Saat ini di sejumlah daerah telah terbentuk Satgas Wasapada Investasi, maka Bapak bisa menyampaikan informasi tersebut.

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

- 1. Day Orders
Orders which automatically expire at the close of the day's trading if not filled during the day on which they are received.
- 2. Day Trader
A trader who enters and exits a position during the course of one day.
- 3. Day Traders
Speculators who take positions in futures or options contracts and liquidate them prior to the close of the same trading day.
- 4. Day Trading
Buying and selling the same securities within the same day. Closing out the positions before the end of the day trading day.
- 5. Day-trader
Futures or options traders (often active on the trading floor) who usually initiate and offset position during a single trading session.
- 6. Dealer option
A put or call on a physical good written by a firm dealing in the underlying cash commodity. A dealer option does not originate on, nor is it subject to the rules of an exchange.
- 7. Debit Balance
Money owed to a broker/dealer by a customer.
- 8. Debt instruments
1) Generally, legal IOUs created when one person borrows money from (becomes indebted to) another person; 2) Any commercial paper, bank CDs, bills, bonds, etc.; 3) A document evidencing a loan or debt. Debt instruments such as T-Bills and T-Bonds are traded on the CME and CBOT, respectively.
- 9. Deep in-the-money
An option is "deep in-the money" when it is so far in-the-money that it is unlikely to go out-of-the-money prior to expiration. It is an arbitrary term and can be used to describe different options by different people.
- 10. Deep in-the-money
Describes an option where the underlying is either well above or well below the strike price. A deep in-the-money option, therefore, has a high intrinsic value, whereas a deep out-of-money option has little or no intrinsic value and is made up largely or totally of time value.

PERKEMBANGAN TRANSAKSI
PASAR LELANG FORWARD KOMODITI AGRO TAHUN 2016
per 31 Juli 2016

No	Penyelenggara	Pasar Lelang ke-		Nilai Transaksi
1	Bandung, Jawa Barat	1	28-Jan-16	Rp697.600.000
		2	29-Feb-16	Rp517.100.000
		3	1-Mar-16	Rp799.500.000
		4	31-Mar-16	Rp401.800.000
		5	28-Apr-16	Rp453.720.000
		6	26-May-16	Rp396.604.000
		7	23-Jun-16	Rp115.000.000
		8	28-Jul-16	Rp1.041.105.000
				Rp4.422.429.000
2	Padang, Sumatra Barat	1	16-Feb-16	Rp3.280.110.000
		2	29-Mar-16	Rp1.486.470.000
		3	12-Apr-16	Rp844.530.000
		4	10-May-16	Rp1.373.660.000
		5	19-Jul-16	Rp1.723.520.000
				Rp8.708.290.000
3	Jawa Timur	1	23-Feb-16	Rp4.755.000.000
		2	22-Mar-16	Rp36.022.540.000
		3	26-Apr-16	Rp16.220.000.000
		4	10-May-16	Rp17.895.000.000
		5	21-Jun-16	Rp10.957.680.000
		6	26-Jul-16	Rp27.735.500.000
				Rp113.585.720.000
4	Lampung	1	18-Feb-16	Rp55.605.000
		2	19-Apr-16	Rp3.293.090.000
		3	13-May-16	Rp1.481.772.500
				Rp4.830.467.500

Sumber : BAPPEBTI

No	Penyelenggara	Pasar Lelang ke-		Nilai Transaksi
5	Yogyakarta	1	2-Mar-16	Rp10.911.550.000
		2	23-Mar-16	Rp914.000.000
		3	20-Apr-16	Rp673.000.000
		4	25-May-16	Rp214.000.000
				Rp12.712.550.000
6	Sulawesi Utara	1	3-Mar-16	Rp2.038.950.000
		2	31-Mar-16	Rp2.450.000.000
		3	25-Apr-16	Rp4.877.250.000
		4	10-May-16	Rp9.832.580.000
		5	2-Jun-16	Rp2.225.900.000
		6	21-Jul-16	Rp8.073.030.000
				Rp29.497.710.000
7	Sulawesi Selatan	1	7-Apr-16	Rp375.000.000
				Rp375.000.000
8	NTB	1	21-Apr-16	Rp1.355.000.000
				Rp1.355.000.000
9	Jambi	1	28-Apr-16	Rp2.433.400.000
		2	28-Jul-16	Rp375.050.000
				Rp2.808.450.000
10	Sulawesi Tenggara	1	28-Apr-16	Rp531.010.000
		2	4-May-16	Rp41.635.000
				Rp572.645.000
11	Gorontalo	1	31-May-16	Rp1.957.800.000
				Rp1.957.800.000
12	Jawa Tengah, Semarang	1	25-Apr-16	Tidak Ada Transaksi
		2	3-Jun-16	Rp55.000.000
		3	30-Jul-16	Rp4.045.000.000
	Cilacap			Rp4.100.000.000
GRAND TOTAL				Rp184.926.061.500

SRG dan Pasar Lelang Komoditi Part 111



Jadi begitu Peb, sinergi antara SRG dan Pasar Lelang Komoditi akan berdampak positif pada stabilitas pasokan dan harga komoditi pangan. Yang pada akhirnya akan menekan tingkat inflasi komoditi pangan.





Pejabat 7 Institusi Satgas Waspada Investasi menandatangani nota kesepahaman.

Efektifkah 7 Institusi Keroyok Investasi Bodong?

*) Eddy SL Purba

Peran serta masyarakat (investor) merupakan kunci keberhasilan Satgas Waspada Investasi

Syahwat cepat kaya dengan modal investasi kecil rasanya sudah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Sebab itu, praktik manipulatif seperti investasi bodong yang marak terjadi beberapa tahun terakhir ini di dalam negeri nyaris sulit ditekan. Bahkan terkesan semakin ditekan maka semakin berkembang dengan berbagai modus yang lebih variatif. Seperti memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Atau, melalui pendekatan tokoh kemasyarakatan yang menjadi panutan.

Maka untuk menekan tindakan

manipulatif itu, pada 21 Juni 2016, lalu, tujuh institusi yang tergabung di Satuan Tugas Waspada Investasi yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan; Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; Kementerian Perdagangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kejaksaan; Kepolisian RI; serta Badan Koordinasi Penanaman Modal, kembali merevitalisasi komitmen yang sudah pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Bentuk komitmen dari tujuh institusi itu, dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan

Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Satuan Tugas Waspada Investasi ini memiliki peran cukup besar dalam mewaspadai dan bahkan menindak praktik investasi bodong yang terjadi di tengah masyarakat. Sebab pada kenyataannya cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang karena ketidaktahuan masyarakat. Atau, tidak adanya laporan masyarakat karena nilai kerugian relatif kecil sehingga enggan melaporkan ke pihak berwajib.

Sebagai ilustrasi dari data yang dihimpun Bareskrim Polri, kasus praktik investasi bodong relatif berfluktuasi

namun tingkat kerugian masyarakat cukup mencengangkan. Pada tahun 2007 ada sebanyak 4 kasus yang terlapor ke Polri dengan tingkat kerugian sebesar Rp 16,127 triliun, dan di tahun 2008 nilai tingkat kerugian masyarakat cenderung menurun yakni sebesar Rp 604 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 2 kasus.

Namun, di tahun 2011 tingkat kerugian masyarakat dari investasi bodong kembali melonjak menjadi Rp 68,520 triliun dengan 8 kasus. Dan di tahun 2012 ada 6 kasus dengan kerugian masyarakat sebesar Rp 10,22 triliun, tahun 2014 ada 2 kasus dengan kerugian Rp 235 miliar, 2015 ada 2 kasus dengan kerugian Rp 289 miliar. Sedangkan untuk tahun 2016, Polri sudah mendeteksi 2 kasus dan masih dalam proses penyidikan.

Investasi Bodong

Mengapa disebut investasi bodong? Dari berbagai investigasi yang dilakukan pihak berwenang, investasi bodong dikategorikan yakni pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan oleh oknum atau badan hukum tertentu dan diinvestasikan pada bidang tertentu yang cenderung tidak memiliki otoritas pengawasan terintegrasi. Dan untuk menarik minat masyarakat, penawaran investasi itu menjanjikan tingkat keuntungan yang tidak wajar dan berbagai bonus atau diskon.

Sebagai contoh, sebuah badan hukum menawarkan investasi emas atau properti dengan nilai relatif kecil namun bersedia memberikan tingkat bunga besar. Di samping itu, investor juga diberi bonus atau diskon jika bisa merangkul calon investor lainnya. Artinya, semakin banyak investor yang diyakinkan dan bergabung pada skema yang ditawarkan maka semakin besar pula keuntungan yang dijanjikan.

Skema investasi seperti ini juga dikenal dengan skema piramida atau di kalangan pelaku pasar keuangan yang populer sejak tahun 1920 disebut skema Ponzi (Charles Ponzi, berkebangsaan Italia).

Umumnya, praktik investasi dengan

skema Ponzi tumbuh subur ketika tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penawaran investasi masih sangat rendah. Di sisi lain, regulasi yang memayungi investasi tersebut relatif minim.

Celah inilah yang selalu dimanfaatkan oknum tertentu untuk menghimpun dana masyarakat dan pada akhirnya menimbulkan kerugian.

Legal dan Logis

Cara efektif masyarakat terhindar dari investasi bodong sejatinya cukup sederhana dengan dua metode. Yakni, pertama melihat dari sisi legalitas perusahaan yang menawarkan investasi tersebut dan melakukan verifikasi kepada pihak berwenang atau otoritasnya. Jika legalitas perusahaan itu sudah mencurigakan atau tidak lengkap, sebaiknya penawaran investasi tersebut dihindari.

Kedua, logis. Jika penawaran investasi itu menjanjikan keuntungan fantastis atau dengan berbagai bonus dan diskon, maka penawaran investasi tersebut harus dihindari. Sebab, pada bidang investasi apa pun tak ada yang menjanjikan keuntungan besar berikut dengan bonus dan diskon. Dengan kata lain dapat diartikan, semakin besar keuntungan yang dijanjikan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi.

Dari berbagai praktik investasi yang merugikan masyarakat seperti yang dijelaskan di atas, akan terkikis jika masyarakat juga berperan aktif. Seperti misalnya melaporkan temuan atau indikasi adanya penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tak logis.

Sebab, segiat apa pun Satgas Waspada Investasi melakukan sosialisasi dan edukasi tanpa peran aktif masyarakat niscaya praktik investasi bodong dapat ditekan. Harap juga diingat, syahwat cepat kaya adalah tabiat manusia yang selalu mencari akal untuk memanipulasi sesamanya. *) Eddy SL Purba Pemerhati Perdagangan Berjangka Komoditi



Implementasi gudang SRG di Kec. Losarang, Kab. Indramayu tidak dapat dipisahkan dari sosok Soen Sudjarwo, Direktur Utama, Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu- PD BWI.

Ketika resmi diangkat menjadi Dirut PD BWI pada September 2013 silam, ada salah satu pesan Bupati Indramayu, Anna Sophanah, yang masih tetap diingat Pak Jarwo, sapaan akrab Soen Sudjarwo. "Hidupkan kembali *Rice Centre*- pusat pengolahan beras Indramayu," demikian diucapkan Soen Sudjarwo ketika menerima Buletin Bappebti di Kantor BWI, Jln. Jend. Sudirman No. 52 Indramayu, Jabar.

Setelah mendapat amanat itu, Jarwo bergegas meluncur ke Kec. Losarang, tempat di mana berdirinya bangunan *rice centre*. "Setelah saya cek, waduh mesin gilingnya (*rice milling unit*- RMU) terlalu kecil. Tapi tidak apa-apa, saya coba tetap untuk berproduksi," tutur Jarwo.

Lantaran kecilnya mesin giling yang dimiliki *rice centre*, terang saja membuat produksinya kurang maksimal. Jarwo bilang, mesin ini hanya dapat berproduksi 4 - 5 ton beras per hari. "Akhirnya saya

lapor lagi ke Bupati, lalu kami putuskan untuk minta bantuan mesin ke Pemerintah Provinsi Jabar," katanya.

Dan diakhir tahun 2015, bantuan RMU yang modern diterima dari Pemprov Jabar. Mesin ini memiliki kapasitas pengolahan yang sangat besar. Kemudian pada Mei 2016, *Rice Centre* Indramayu mulai beroperasi. Di bulan yang sama, gudang SRG di Losarang juga menerbitkan 2 Resi Gudang senilai Rp 419.873.000.

Keberadaan *rice centre* dengan gudang SRG di Losarang memang tidak dapat dipisahkan. Jika ditarik ke belakang, pembangunan *rice centre* sudah direncanakan pada tahun 2008. Saat itu, Pemkab Indramayu membeli lahan seluas 10 hektar di Kec. Losarang. Di tanah ini juga Kementerian Perdagangan membangun gudang SRG pada tahun 2010.

Tapi sayangnya implementasi *rice centre* maupun gudang SRG di Losarang

tak seperti yang diharapkan. *Rice centre* hanya sempat berjalan pada tahun 2011 hingga 2012. Sedangkan gudang SRG tak berjalan sedikitpun. Barulah, ketika Jarwo memegang PD BWI, gairahnya mulai terlihat.

Di samping itu, PD BWI pun bertekad mengimplementasikan gudang SRG di Losarang dengan mengajukan diri sebagai Pengelola Gudang SRG dengan menggandeng PT Food Station Tjipinang Jaya- FSTJ selaku Pengelola Gudang SRG di DKI Jakarta.

"Di *Rice Centre* Indramayu, instrumen SRG akan diintegrasikan dengan bisnis pengolahan beras. Jadi petani akan bisa mengolah gabah menjadi beras, sekaligus menyimpan hasil panennya melalui skema SRG," ujar pria kelahiran tahun 1956, ini.

Hebatnya lagi, BWI siap menjadi *standby buyer* baik gabah atau pun beras milik petani yang sudah jatuh tempo

dalam skema SRG. "Jadi petani tak perlu khawatir, kami akan membeli gabah atau beras mereka. Sebab kami memiliki RMU yang memang membutuhkan pasokan gabah setiap hari," ujarnya.

Langkah Pemkab Indramayu untuk membangun *rice centre* mendapat apresiasi positif dari Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Sebab itu, kedua menteri ini sepakat dengan keberadaan *Rice Centre* Indramayu sebagai terobosan untuk bisa menciptakan ketahanan pangan nasional. Lantaran itu, dikabarkan Presiden RI, Joko Widodo direncanakan akan menyambangi *Rice Centre* Indramayu yang akan menjadikan sebagai daerah *raw model*- percontohan.

Ekspor

Meski banyak menuai pujian dan sorotan, tidak menjadikan Jarwo berpuas diri. Dia bilang, jika diibaratkan orang yang sedang mengikuti perlombaan balap lari, *Rice Centre* Indramayu saat ini masih berdiri di garis start. Karena masih banyak tantangan dan kendala yang harus dipecahkan dan dicari jalan keluarnya.

"Satu contoh, Mentan Arman, saat berkunjung ke *Rice Center* Indramayu beberapa waktu lalu, mencoba menantang kami untuk mengeksport beras. Saat itu, saya pun langsung menjawab dan memberi respon bahwa Indramayu bisa lakukan ekspor beras, dengan catatan *Rice Center* Indramayu mendapat dukungan permodalan dan peralatan. Karena itu pun Kementan akan menyumbang 1 unit RMU yang sejenis dengan RMU yang sekarang kami miliki," ujar ayah dari dua orang anak ini.

Di samping itu, sebagai ikhtiarnya untuk menjalankan *rice centre*, Jarwo terus berupaya merangkul kelompok tani setempat. "Tapi Poktannya adalah petani kecil yang sawahnya di bawah 2 hektar. Mereka inilah yang masih sangat bergantung dengan tengkulak," jelasnya. Sedangkan petani yang memiliki lahan di atas 2 ha, umumnya sudah bisa

berdiri sendiri alias sudah cukup mapan. Adapun keberadaan tengkulak juga tidak bisa dibiarkan oleh Jarwo. Dia mengarahkan tengkulak untuk bisa menjadi pengepul.

"Saat ini, sudah ada 32 Poktan di Indramayu yang menjadi binaan PD BWI. Total luas sawah mereka mencapai sekitar 4.000 ha, dan kami baru bisa menyerap hasil panen gabah dari sekitar 1.300 ha. Tapi ini pun sudah cukup lumayan. Kalau saja 1 ton gabah per hektar dimasukan ke *rice center*, berarti sudah ada sebesar 1.300 ton," kata legium Ditjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, tahun 2013, ini.

Sehingga untuk menambah daya serap itu, tambahnya, kami menyusun strategi dengan pertanyaan apa keuntungan menjadi binaan PD BWI? Karena itu, menurut Jarwo, BWI akan memberi pinjaman modal berupa bibit, pupuk dan biaya lainnya. Nanti, setelah panen, barulah mereka membayar pinjaman tersebut. Tapi sebagai catatan, pinjaman itu bukan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang.

"Untuk perhitungan saat ini, untuk mengelola lahan sawah 1 hektar dibutuhkan biaya modal sekitar Rp 4 juta. Jadi jika lahan binaan BWI mencapai 1.300 ha, maka dibutuhkan biaya sekitar Rp 5,2 miliar. Nah, untuk biaya Rp 5,2 miliar itu, pak Menteri Perdagangan Enggartiasto, sudah menjanjikan memberi bantuan permodalan," jelas Jarwo, bersemangat.

Di bawah pengelolaan PD BWI, kini *Rice Centre* berhasil memproduksi beras sehat. Beras tersebut telah dijual di Pasar Induk Cipinang, Pasar Johar, Jakarta dan pasar beras lainnya. Dalam sehari, PD BWI mampu memasarkan beras hingga 15 ton. "Tidak setiap hari sih, karena 'lubangnya' baru sedikit, dan kami masih terus berjuang memasarkannya," ungkap pria berdarah Demak dan Indramayu ini.



Jika mengukur kemampuan RMU yang ada di *Rice Centre*, angka tersebut memang kurang maksimal. Meski begitu, untuk menjadi pusat beras di Jabar, PD BWI terus mengejar target produksi beras semaksimal mungkin. Jarwo menjelaskan, RMU yang ada mampu mengolah 5 ton gabah per jam. Sedangkan pekerja di *Rice Center* dibagi menjadi dua jam kerja, masing-masing 8 jam kerja. Jadi, total jam kerjanya hingga 16 jam. Jika 16 jam dikali 5 ton maka RMU akan mengolah 80 ton gabah per hari. Artinya, dalam satu bulan (25 hari kerja), siap menampung gabah kering giling 2.000 ton. Dan dalam satu tahun (275), mampu mengolah 27.500 ton gabah.

"Sedangkan dari masa tanam ke masa tanam lagi, dibutuhkan 100 hari atau 3 bulan. Jadi, supaya mesin ini jalan terus, kami harus punya gudang dengan kapasitas penyimpanan 6.000 ton. Sedangkan gudang SRG di Losarang hanya menampung 1.500 ton, dan hal ini masih terus kami koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan," pungkas Soen Sudjarwo.

Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id